



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Jl. Gatot Subroto No.2 Telp (0421) Kode Pos 91212

Email : opdpsda@gmail.com

PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PINRANG
SELAKU ATASAN PPID DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
NOMOR : 70 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PINRANG

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 70 Tahun 2021
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 70 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 5 April 2021

KEPALA DINAS,
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

Ir. H. MUH. JENAL S., ST., MT |
Pangkat : Pembina Tk. I |
Nip : 19650519 199603 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
 DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN PINRANG
 NOMOR
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN

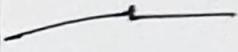
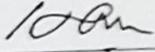
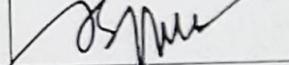
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 70 TAHUN 2021

Pada hari ini, senin tanggal 5 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian Selama kode masih digunakan
			Akibat bila dibuka Penyalahgunaan oleh pihak lain	Manfaat jika ditutup Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	
1.	Source code Aplikasi	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan			

		Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut			
2.	Dokumen Pribadi ASN	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Ir. H. MUH. JENAL S, ST.,MT	Kepala Dinas	DINAS SDABK	
2.	H. SYAHRUDDIN, ST.,M.Si	Sekretaris	DINAS SDABK	
3.	MUHAMMAD HASBI, SP.,M.Si	Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan	DINAS SDABK	
4.	ASRUL NURDIN, ST	Kepala Bidang Bina Konstruksi	DINAS SDABK	
5.	Ir. MUHAMMAD HUSNI NAKKA, ST.,MT	Kepala Bidang Irigasi Pedesaan	DINAS SDABK	
6.	ASPAR, ST	Kepala Bidang Program & Evaluasi	DINAS SDABK	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 KEPALA DINAS,
 SEBAGAI ATASAN PPID



Ir. H. MUH. JENAL S, ST., MT
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip : 19650519 199603 1 002